

Polres Bogor Siagakan Anggotanya di SPBU Jelang Kenaikan Harga BBM

BOGOR (IM)— Polres Bogor menyiapkan anggotanya di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) untuk mencegah antrean panjang dan menjaga ketertiban menjelang kenaikan harga BBM. Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin menuturkan, Polres Bogor mengantisipasi kemungkinan adanya reaksi dari masyarakat terhadap rencana kenaikan BBM per 1 September 2022.

“Antisipasi sudah koordinasi dengan SPBU-SPBU. Nanti kita tempatkan anggota untuk melakukan pengamanan, juga anggota mobil (berkeliling). Di Kabupaten Bogor sejauh ini masih relatif normal, belum ada gejala dan tidak ada penumpukan,” kata Iman di Mapolres Cibinong, Bogor, Rabu (31/8).

Selain menyiapkan personel, Polres Bogor juga melakukan edukasi kepada masyarakat dengan kebijakan yang diambil pemerintah pusat.

“Kami berupaya terus menjaga stabilitas harga jika ada kenaikan, tentunya yang tidak meresahkan masyarakat, kami juga bekerja sama dengan Pemkab Bogor untuk mitigasi dampak dengan penyaluran bansos, kemudian pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.

Dalam beberapa waktu

terakhir, rencana kenaikan harga BBM terus menguat. Berbagai informasi menyebutkan BBM akan naik di rentang harga Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter, dari harga Pertalite saat ini Rp 7.650 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter.

Namun hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Jokowi. Pemerintah baru memberikan tiga bantuan sosial Rp 24,17 triliun. Pertama, Bantuan Langsung Tunai untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp 150.000 sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp 12,4 triliun. BLT tersebut akan dibayar Rp 300.000 oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.

Kedua, bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, sebesar Rp 600.000 yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun. Lalu ketiga, juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial. ● yan

Kecamatan Cijeruk Bogor Berpotensi Menjadi Sentra Bibit Durian

CIBINONG (IM)— Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan, menyebutkan wilayah Kecamatan Cijeruk akan dijadikan sebagai sentra bibit durian di Kabupaten Bogor. Hal itu dilakukan melihat besarnya potensi petani durian di kawasan tersebut. “Besarnya potensi pertanian durian di wilayah Kecamatan Cijeruk ini, bisa kita jadikan sebagai sentra durian seperti di Medan. Jadi kalau ada wisatawan yang datang ke Kabupaten Bogor ingin mencicipi durian bisa diajak ke Cijeruk,” ujar Iwan, Selasa (30/8) kemarin.

Tidak hanya potensi pertanian durian saja, Iwan mengatakan, pertanian lain juga cukup potensial seperti nanas. Juga adanya rencana pembangunan rest area Cijeruk. Maka wilayah Cijeruk ini sangat potensial untuk dijadikan sentra wisata makan durian.

“Maka perlu pembinaan yang maksimal kepada para petani di Cijeruk ini, menuju petani modern dan petani milenial. Agar mereka memiliki kemampuan yang baik, tidak hanya dalam proses pertaniannya saja, tapi dari packaging, hingga pemasarannya juga baik,” ujarnya.

Camat Cijeruk, Bangun Septa Siswa mengatakan, wilayah Cijeruk memiliki produk petani unggulan dan jadi primadona yakni durian. Beberapa daerah

lain tidak sedikit yang mengambil bibit buah durian ke wilayah Kecamatan Cijeruk.

“Kalau daerah lain saja menanam dengan bibit dari kami, kenapa tidak kita coba menanamnya. Bahkan saya minta setiap warga bisa menanam minimal satu pohon durian. Alhamdulillah selain dari bibit kami juga menuai hasil dari buahnya,” tuturnya.

Pewakilan Kelompok Tani Muda Berkah Desa Palasari Kecamatan Cijeruk, Endang Supriatna menyatakan, sejak dekade 80-an pertanian bibit durian telah ada di Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. Seiring waktu, pertanian bibit durian semakin berkembang dan menjadi mata pencaharian masyarakat Kecamatan Cijeruk. Menurutnya saat ini pertanian bibit durian tersebar tidak hanya di Desa Palasari bahkan di beberapa desa wilayah Kecamatan Cijeruk.

“Alhamdulillah banyak pihak dari luar yang belajar kepada kami, salah satunya dari Majalengka. Di kesempatan yang baik ini, kami mohon bantuannya kepada Plt. Bupati Bogor untuk dapat mensupport pertanian kami. Baik dalam bentuk penjualan atau pemasarannya,” tutur Ending. ● gio

IDN/ANTARA



KONDISI SUNGAI CITARUM DI CURUG JOMPONG

Seorang warga mengambil air Sungai Citarum di Curug Jompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (31/8). Warga sekitar tetap memanfaatkan sumber daya Sungai Citarum di Curug Jompong tersebut meski kondisi air sungai yang mulai kembali ditutupi buih dan sampah akibat penurunan debit air saat musim kemarau.

Yana Optimistis Seluruh Kelurahan Kota Bandung 100 Persen ODF Tahun 2023

BANDUNG (IM)— Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengencakan program Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di seluruh wilayah. Sampai saat ini sudah 62 persen kelurahan di Kota Bandung berhasil ODF. Targetnya, pada 2023 mendatang 151 kelurahan se-Kota Bandung sudah 100 persen ODF.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, dalam setahun akselerasi ODF di seluruh kelurahan Kota Bandung meningkat pesat. “Pada tahun 2020 baru ada 17 kelurahan yang ODF. Lalu, di tahun 2021, terdapat 93 kelurahan yang ODF. Ini berarti sudah 62 persen kelurahan di Kota Bandung berstatus ODF. Dari 151 kelurahan, 58 yang belum 100 persen ODF,” jelas Yana pada diskusi di Auditorium Balai Kota, Rabu, 31 Agustus 2022.

Menurutnya, ODF sangat memengaruhi stunting dan tingkat kesehatan masyarakat. Sehingga, perlu adanya kolaborasi bersama kelompok masyarakat sekitar dan sektor lain. “Meski begitu, jika melihat indikator yang ada, 100 persen ODF di tahun 2023 bisa terpenuhi. Tapi tentu-

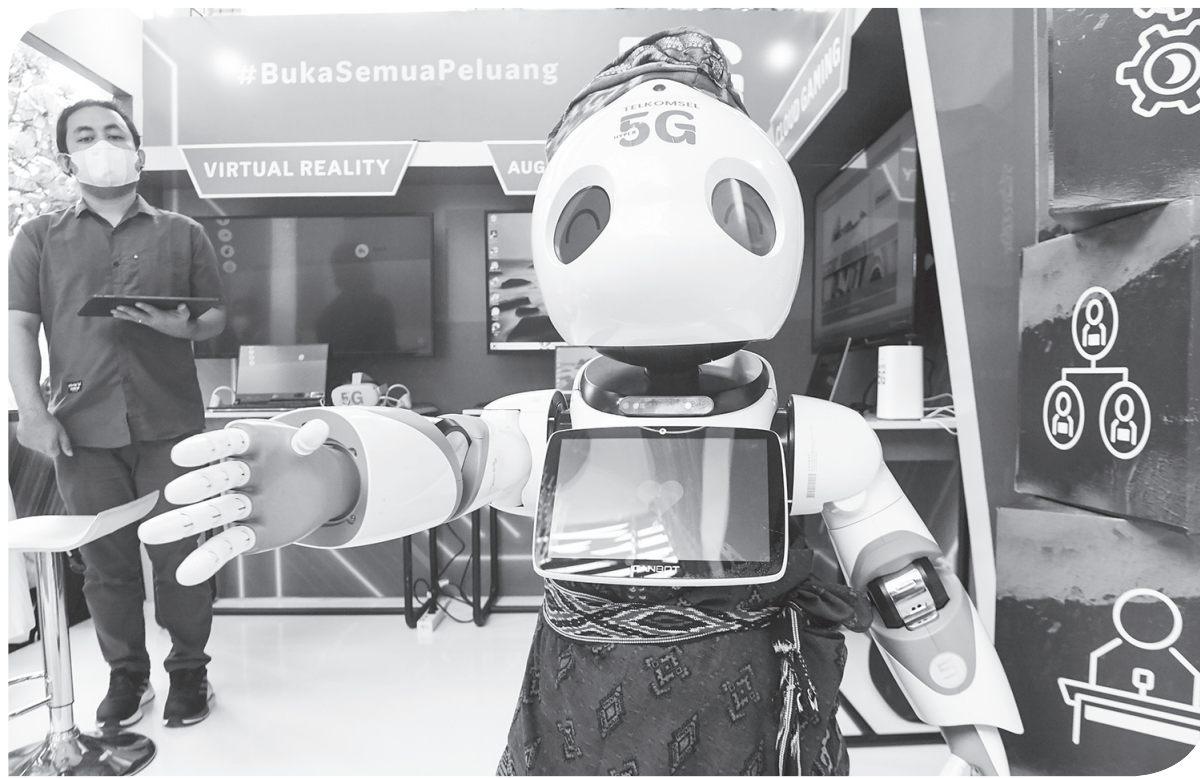
nya pendampingan dari Dinas Kesehatan dan lainnya harus terus diberikan kepada pihak kelurahan,” ucapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Sony Adam mengatakan, untuk pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi hasil progres terkait intervensi kepala keluarga (KK) yang masih Open Defecation (OD).

“Masih ada 58 kelurahan yang belum berstatus ODF, di mana KK nya masih banyak yang OD. Ini akan kita bahas sebagai tindak lanjut pada pertemuan 23 Agustus 2022 kemarin,” ujar Sony.

Dinkes Kota Bandung akan membuat komitmen dan strategi untuk mengintervensi KK OD disesuaikan dengan mapping yang telah disepakati di tingkat kewilayahan. Di tempat yang sama, Ketua Paguyuban Camat, Syukur Sabar menuturkan, sinkronisasi data perlu dilakukan untuk menyelesaikan program ODF ke seluruh jajarannya. “Kelurahan selaku fasilitator dan koordinator. Kita juga bisa berkoordinasi dengan Citarum Harum dan sektor swasta lain untuk membangun sanitasi,” imbuh Syukur. ● pur

8 | Nusantara



PAMERAN ITF PADA DEWG G20

Robot Humanoid 5G dari Telekom sel menyapa pengunjung saat pameran Gugus Tugas Industri (ITF) pada pertemuan keempat Kelompok Kerja Ekonomi Digital (4th DEWG) Presidensi G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/8). Sebanyak 12 perusahaan dan dua instansi pemerintah meramaikan pameran ITF pada 4th DEWG yang menampilkan gambaran transformasi digital Indonesia yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.

IDN/ANTARA

Trem Kota Bogor akan Dibiayai Pihak Swasta

Proyek trem Kota Bogor merupakan salah satu proyek vital. Terutama dari sisi sustainability Kota Bogor yang merupakan kota heritage yang ada di Indonesia, serta visi misi Kota Bogor untuk mengurangi polusi.

BOGOR (IM)— Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor semakin memantapkan perencanaan dan pengembangan perkeretaapian perkotaan atau trem di Kota Bogor. Saat ini, proyek trem Kota Bogor memasuki fase pembiayaan yang rencananya akan menggunakan dana dari swasta.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarta, mengatakan fase pembiayaan trem me-

mang agak berliku. Karena tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. “Ini pendanaannya ada beberapa model yang insya Allah akan kita jajaki,” kata Bima Arya kepada wartawan usai Forum Group Discussion (FGD) perencanaan dan pengembangan trem, Rabu (31/8).

Untuk itu, kata dia, sudah disepakati ada kerja sama antara Pemkot Bogor, dalam leadingnya PT Perumda Trans Pakuan yang akan bermitra bersama Indonesia Infrastructure Finance (IIF). “Bersama IIF, Pemkot melalui Perumda Transpakuan akan mengeksplor mengelaborasi model pendanaan tadi. Sambil menyempurnakan terus kajian-kajian teknisnya,” jelasnya.

Managing Director & Chief Investment Officer IIF, M Ramdhan Harahap, mengatakan pembiayaan trem Kota Bogor kurang lebih mencapai angka Rp 1,2 triliun. Dengan pembiayaan yang akan mengikuti skema non KPBU.

Menurutnya, proyek trem Kota Bogor merupakan salah satu proyek vital. Terutama dari sisi sustainability Kota

Bogor yang merupakan kota heritage yang ada di Indonesia, serta visi misi Kota Bogor untuk mengurangi polusi.

“Kami selaku katalis pembiayaan infrastruktur di Indonesia, siap untuk melakukan support. Baik dari sisi pendampingan, dan pembiayaan project tersebut,” ujar Ramdhan.

Saat ini, kata dia, pemerintah memiliki kendala pembiayaan yang sangat terbatas. Untuk itu pihaknya siap untuk membantu dari sisi pembiayaan. “Jadi proyek ini tidak membebaskan APBD Kota Bogor,” tegasnya.

Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemhub) RI, Zamrides, mengatakan BPTJ sangat mendukung proyek trem Kota Bogor. Terutama

dari segi perintegrasi antar moda nantinya.

Nantinya, trem akan terintegrasi dengan Light Rail Transit (LRT), Commuter Indonesia, dan Transit Oriented Development (TOD) yang akan dibangun di Terminal Baranangsiang untuk mendukung program ini.

“Jadi kami dari segi integrasi maupun TOD, sangat mendukung program trem di Kota Bogor ini,” ujarnya.

Direktur Sarana Perkeretaapian pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJK), Djardot Tri Wardhono, mengatakan DJKA juga mendukung proyek yang digagas Pemkot Bogor.

“Dari segi perizinan kami akan support rekomendasi karena ini wilayah kota, maka kami akan dukung dari rekomendasi dan perizinan,” pungkaskannya. ● gio

TERKAIT KASUS RSUD BOGOR UTARA

Anggota Dewan: WTP Bukan Tujuan Akhir Pengelolaan Keuangan

PARUNG (IM)— Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya menegaskan perbedaan antara audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor dalam objek proyek pembangunan RSUD Bogor Utara.

Menurut Asep, audit BPK Perwakilan Jawa Barat lebih ke sisi administratif dan berujung pada opini Wajar Tanpa Dengan Penguculan (WTD) dan atau lainnya, maka langkah audit yang dilakukan oleh Kejari Kabupaten Bogor lebih ke sisi fisik, dikerjakan oleh ahli konstruksi dan berujung pada tahap penyidikan.

“Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Barat sifatnya administratif karena terkait dengan cara penyajian laporan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan negara, kalau Kejari Kabupaten Bogor melakukan audit fisik yang mereka minta dilaksanakan audit independen yang merupakan ahli di bidang konstruksi atau infrastruktur,” kata Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Selasa (31/8).

Asep menuturkan, opini WTP atau WDP lainnya diberikan dengan kriteria yang jelas dan pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan (best practices). Di mana opini WTP atau WDP diberikan untuk menunjukkan kewajaran informasi laporan keuangan, bukan secara spesifik untuk menyatakan bahwa entitas yang mendapatkan opini WTP telah bebas dari dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

“WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan. Predikat tersebut justru menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah untuk mengkolerasikannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pemerintah harus bekerja keras meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” tutur Asep.

Terkait, pernyataan Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan lebih mengacu kepada LHP BPK RI ketimbang hasil audit fisik Kejari Kabupaten Bogor, yang hasilnya menyimpulkan dugaan adanya Tipikor, sarjana hukum alumni Universitas Pajajaran itu pun mengambil jalan tengah agar BPK Perwakilan Jawa Barat ikut atau juga melakukan audit fisik.

“Ajak aja BPK Perwakilan

Jawa Baratnya melakukan audit fisik, ke RSUD Bogor Utara,” paparnya.

Sebelumnya, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan lebih mengacu kepada LHP BPK Perwakilan Jawa Barat, ketimbang dugaan Tipikor yang sebelumnya ditetapkan proses penyidikan oleh Kejari Kabupaten Bogor, pada proyek pembangunan RSUD Bogor Utara di Desa Cogrek, Parung. Di mana hasil audit Kejari Kabupaten Bogor menguduga ada kerugian negara sebesar Rp 36 milyar, di luar sanksi denda Rp 10,2 milyar.

“Terkait hal itu (proyek pembangunan RSUD Bogor Utara) kami percayakan kepada LHP BPK Perwakilan Jawa Barat, di mana terjadi kelebihan bayar sebesar Rp 2,9 miliar dan sanksi denda yang harus dibayarkan Rp 10,2 milyar,” singkat Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku tidak mengetahui parameter perhitungan atau audit yang dilakukan oleh Kejari Kabupaten Bogor. “Catatan LHP BPK Perwakilan Jawa Barat sudah keluar, di mana kerugiannya segitu. Masyarakat silakan melihat biar pada tau kerugian (negeranya),” ungkapnya. ● gio



INDONESIA HIJAB FEST 2022

Pengunjung memadati arena Indonesia Hijab Fest 2022 yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Rabu (31/8). Indonesia Hijab Fest 2022 yang diikuti sedikitnya 139 merek lokal dari berbagai kota di Indonesia tersebut digelar dalam rangka pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19.

Plt Bupati Bogor Bagikan STB Gratis ke Warga Kurang Mampu

BOGOR (IM)— Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan membagikan Set Top Box (STB) gratis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI, kepada salah satu warga Kecamatan Cijeruk, Selasa (30/8).

Pemberian bantuan ini, dilakukan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, saat kegiatan Bogor Keliling atau Saba Desa ke wilayah Kecamatan Cijeruk.

Sebagai informasi bahwa pembagian Set Top Box (STB) gratis merupakan program Kemkominfo RI bagi masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia, salah satunya masyarakat Kabupaten Bogor. Seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yaitu tengah melakukan program migrasi siaran TV analog ke digital, atau yang dikenal sebagai Analog Switch Off (ASO) pada November tahun 2022 ini.

Pembagian STB gratis bagi masyarakat kurang mampu adalah program dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Radiogram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 978/3406/SJ, klasifikasi segera, tentang Bantuan Set Top Box (STB) bagi Rumah

Tangga Miskin dan surat undangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor :B-1285/DJPP1.5/PL.04.02/08/2022.

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, seiring dengan perkembangan teknologi digitalisasi perlu kesiapan semua pihak termasuk masyarakat, untuk menyelesaikan peralihan dari TV analog ke TV digital, salah satunya melalui program bantuan STB gratis bagi masyarakat kurang mampu.

“Peralihan ini harus kita ikuti, Alhamdulillah hari ini saya launching bantuan alat Set Top Box (STB), jadi masyarakat bisa nonton Persikabo, juga bisa nonton Aldebaran dengan jernih,” kelakar Iwan Setiawan.

Kemudian, salah satu penerima Program STB gratis, warga Desa Palasari Kecamatan Cijeruk II, Intan menyatakan, sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikannya alat STB gratis.

“Paling mau saya pakai untuk nonton RCTI, Indosiar dan SCTV, mudah-mudahan Kabupaten Bogor kedepannya lebih maju, dan semoga yang lain juga bisa dapat STB gratis seperti saya,” pungkaskannya. ● gio

Masyarakat Jabar Selatan Diminta Waspada Gelombang Tinggi

BANDUNG (IM)— Masyarakat Jabar Selatan kini mesti lebih waspada. Prakirawan BMKG, Yan Firdaus Permadi meminta warga di sana mewaspada ancaman gelombang tinggi hingga awal September nanti.

Menurutnya, BMKG memperkirakan akan ada gelombang tinggi hingga 4-6 meter yang terjadi secara intens. Masyarakat Jabar Selatan khususnya Sukabumi Selatan wilayah Pangandaran akan menjadi wilayah rawan. BMKG juga memperhitungkan gelombang tinggi itu diakibatkan tingginya Monsun Australia dan Gelombang Ekuatorial Rossby yang sedang aktif. Untuk itu, Masyarakat Jabar Selatan diimbau untuk lebih waspada terhadap dampak gelombang pasang berupa angin kencang disertai hujan lebat.

“Akan ada potensi gelombang tinggi 4 sampai 6 meter sejak kemarin, sampai 2 September nanti khususnya di wilayah Jabar Selatan. Jadi mohon berhati-hati. Ini disebabkan angin selatan dari Australia kencang. Monsun Australia dan tingginya aktivitas gelombang ekuatorial. Ini akan disertai angin kencang dan hu-

jan lebat, mulai dari Sukabumi sampai Pangandaran,” ujarnya, Rabu (31/8).

Sementara, daerah lain di Jawa Barat seperti Bandung Raya dan wilayah Pantai Utara kata Yan, cenderung lebih aman. Hanya saja diakuinya, akan ada potensi hujan besar yang terjadi akibat anomali cuaca akibat fenomena La Nina berkepanjangan, kendati saat ini tengah memasuki fase akhir musim kemarau.

“Dampak langsung ke Bandung Raya enggak ada. Paling hanya hujan, walaupun sekarang sedang berada di puncak musim kemarau. Ini karena IOD (Indian Ocean Dipole) yang berada di fase negatif, serta adanya La Nina aktif berkepanjangan. Musim pasang kemarau ini sendiri, diprediksi akan berakhir pertengahan atau akhir September nanti,” ucapnya.

Seperti diketahui, Selasa pagi terjadi banjir rob akibat gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah daerah seperti Pangandaran, Garut Selatan serta Cianjur Selatan. Air laut naik hingga ke jalan raya, meski pada akhirnya berangsur normal. ● pur